

## **IBM KELOMPOK PERANGKAT DESA TOUURE DAN DESA TOUURE DUA KECAMATAN TOMPASO BARAT**

**<sup>1</sup>Antonius Y. Luntungan, <sup>2</sup>Jacline I. Sumual, <sup>3</sup>Burhan Niode**

*<sup>1,2</sup> Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi, Manado, 95115, Indonesia*

Email : <sup>1</sup>[Anton.luntungan@yahoo.co.id](mailto:Anton.luntungan@yahoo.co.id), <sup>2</sup>[jaclinesumual@yahoo.co.id](mailto:jaclinesumual@yahoo.co.id), <sup>3</sup>[nadniode@yahoo.co.id](mailto:nadniode@yahoo.co.id)

### **ABSTRAK**

*Permendagri No 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa Touure dan Desa Touure 2, mengalami keterbatasan akan kurangnya kemampuan sumberdaya manusia khususnya aparatur desa dalam penguasaan keterampilan komputer dalam pengelolaan administrasi desa dan pengarsipan, sehingga pemerintahan kurang akuntabel dan transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan baik administrasi desa, keuangan dan perencanaan pembangunan. Permasalahan Mitra (1 dan 2) Pemerintah Desa, yaitu rendahnya ketrampilan aparat desa dalam penerapan sistem komputerisasi dalam operasional pengisian Buku Administrasi dan Keuangan Desa serta penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dalam implementasinya tertuang dalam Peraturan Pemerintah no 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU no 6 Tahun 2014. Penugasan dan pengelolaan administrasi keuangan, umumnya belum dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dikarenakan Masalah utama yaitu banyak dari para aparatur pemerintah desa belum memiliki ketrampilan penggunaan komputer.*

*Kata kunci : Pemberdayaan Aparatur Desa, Ketrampilan komputer*

## 1. PENDAHULUAN

### Analisis Situasi

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa memerlukan suatu manajemen yang baik sebagai kunci keberhasilan organisasi pemerintahan desa. Pemerintahan desa sebagai administrasi publik yang tertata baik akan mampu menjadi *good governance / good public governance*.

Era globalisasi menuntut adanya perubahan paradigma (*shifting paradigm*), perubahan mind-set dan culture-set, membangun masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*) dan masyarakat berbasis iptek (*science and technology-based society*) sebagaimana menurut Tofler (1991).

Administrasi pemerintahan desa memegang peranan penting bagi aparatur desa dan masyarakat. Menurut Permendagri No 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dalam implementasinya tertuang dalam Peraturan Pemerintah no 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU no 6 Tahun 2014.

Desa Toure dan Desa Toure Dua, sebagai lokasi Mitra terletak di wilayah Kecamatan Tompasso Barat Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara, dengan jarak desa dari Kota Manado  $\pm 55$  km dengan waktu tempuh 100 menit, jarak dari Tondano sebagai ibukota kabupaten  $\pm 20$  km.

Desa Toure dan Desa Toure Dua menjadi mitra karena masih menemui masalah sumberdaya manusia dalam pengelolaan administrasi pembukuan dan keuangan desa yang harus dikerjakan Pemerintah Desa dalam pelaporan tahunan yang secara langsung harus dilakukan dan diketahui seluruh apar desa, dalam hal ini baik Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Kas desa, Kepala Jaga, Kepala-Kepala Urusan serta Kepala Badan yang ada di desa, termasuk pembuatan perencanaan pembangunan desa yang harus diselesaikan. Dalam arti hal ini harus menjadi perhatian.

### Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi di atas dan hasil diskusi dengan kedua Mitra, maka masalah yang teridentifikasi, sebagai berikut:

Permasalahan Mitra (1 dan 2) Pemerintah Desa, yaitu rendahnya perhatian aparat desa dalam penyediaan dan pengisian Buku-Buku Administrasi dan Keuangan Desa, surat menyurat, pengarsipan data seperti :

**I. Buku Administrasi Umum, yaitu:**

1. Buku Data Peraturan Desa .
2. Buku Data Keputusan Kepala Desa.
3. Buku Data Inventaris Desa.
4. Buku Data Tanah di Desa.

Buku Administrasi Desa umumnya belum dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Administrasi Desa khususnya pada lampirannya tentang model-model pembukuan administras desa.

**II. Buku Administrasi Keuangan Desa, yaitu:**

1. Buku Kas Umum.
2. Buku Kas Pembantu Kegiatan.
3. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa.

**III. Administrasi Surat Menyurat**

Masalah utama yaitu banyak dari para aparatur pemerintah desa belum memiliki ketrampilan penggunaan komputer,hal ini sangat berhubungan dengan pembuatan surat-menyurat baik di internal desa maupun korespondensi dengan eksternal

**2. TARGET DAN LUARAN**

Tim Ibm Kelompok Aparat Desa Touure dan Desa Touure Dua Kecamatan Tompaso Barat menargetkan khusus kepada aparat desa untuk menjadi sasaran program dengan pengetahuan komputer, khususnya dalam pengoperasian komputer sampai pada proses pengenalan excel dan mengisi data oleh aparat desa mitra sehingga memperoleh luaran dalam pengisian data administrasi desa terutama dalam pembuatan laporan tertulis pertanggungjawaban akan keuangan desa sebagai berikut:

- 1) Buku Kas Umum,
- 2) Buku Kas Pembantu Kegiatan.
- 3) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa
- 4) Artikel ilmiah / Jurnal ilmiah.

**3. METODE PELAKSANAAN**

Berdasarkan permasalahan kedua Mitra diperlukan solusi berupa metode pelaksanaan yang lebih memudahkan dalam pelaporan administrasi desa sebagai berikut :

1. Metode pengenalan pengoperasian dasar komputer.
2. Pelatihan program Excel.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Hasil

Desa Toure dan Desa Toure Dua termasuk dalam wilayah Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa yang berjarak 55 kilometer dari Kota Manado dan dapat di tempuh dengan waktu lebih kurang 100 menit. Pada dua desa ini dihuni oleh 1.274 jiwa yang masing-masing desa Toure 654 jiwa dan desa Toure Dua sejumlah 620 jiwa.

Desa Toure dan Toure Dua adalah daerah pertanian tanaman pangan dengan berbagai produk pertanian seperti ubi jalar ungu, kacang merah, bawang merah, jagung. Desa Toure dan Desa Toure Dua adalah menjadi sentra produksi tomat apel dan tanaman ini merupakan salah satu sumber pendapatan petani setiap tahunnya disamping pendapatan petani dari tanaman lainnya sebagai produk yang diusahakan oleh petani, sehingga produksi dan harga tomat apel sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

**Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Desa Toure dan Desa Toure 2**

Desa/Kelurahan	Penduduk (jiwa)	KK	L	P
Toure	654	226	313	341
Toure 2	620	220	301	319
Jumlah	1274	446	614	660

*Sumber : Data Desa*

Dalam pelaksanaan IbM Kelompok Perangkat Desa Toure dan Desa Toure Dua Kecamatan Tompaso Barat adalah sangat perlu dalam merespon akan tuntutan keadaan yang terus berkembang dalam peningkatan sumberdaya manusia khususnya aparat desa mengetahui dan memahami dalam pembuatan laporan-laporan tertulis walaupun masing-masing desa memiliki aparat yang berlatar belakang petani, seperti dalam tabel berikut:

**Tabel 4.2. Jumlah Aparat Desa dan Lingkungan**

Desa/Kelurahan	Aparat	Lingkungan
Toure	12	3
Toure 2	12	3
Jumlah	24	6

*Sumber : Data Desa, 2015*

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa Desa Toure memiliki aparat sebanyak 12 orang sudah termasuk Hukomtua begitupun dengan Desa Toure Dua juga memiliki jumlah aparat 12 orang termasuk Hukomtua.

Tingkat pendidikan seorang aparat dapat mempengaruhi produktifitasnya di dalam melaksanakan tugas tanggungjawabnya dalam pelayanan kepada masyarakat. tingkat pendidikan itu dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.3. Jumlah Aparat Menurut Tingkat Pendidikan**

Desa	SD	SMP	SMA	S1	JUMLAH
Touure	2	3	7	-	12
Touure Dua	2	4	6	-	12

Sumber : Data Desa, 2015

Pada dua desa ini dihuni oleh 1.274 jiwa yang masing-masing desa Touure 654 jiwa dan desa Touure Dua sejumlah 620 jiwa serta secara administrasi desa mitra ini masing-masing mendiami 3 wilayah jaga (lingkungan).

### **Pembahasan**

Pemerintah desa beserta masyarakat desa kesehariannya adalah sebagai masyarakat petani pada umumnya dan hanya sebagian kecil berprofesi sebagai pegawai dan tukang. Sehingga dalam pelaksanaan kerja dari aparat desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat desa menjadi tidak maksimal.

Pelaksanaan ipteks bagi masyarakat agak mengalami kendala pada awal mula dalam survey dan pemberitahuan kepada pemerintah desa dalam hal ini kepala desa atau Hukumtua Desa Touure dan Hukumtua Desa Touure Dua. Hal ini sangatlah beralasan yang dikarenakan seluruh aparat desa dalam kehidupan setiap hari adalah petani di desa, sementara sangat kurangnya animo waktu dari aparat desa dalam mencari tahu tugas dan tanggung jawab aparat dalam pelaksanaan roda pemerintahan di era transformasi teknologi sekarang ini.

Tim ipteks bagi masyarakat berupaya memberikan pengertian tentang pentingnya masyarakat mengetahui perkembangan teknologi terlebih lagi aparat desa dalam membuat administrasi desa terutama dalam pelaporan administrasi keuangan secara baku menurut aturan perundangan yang ada dan harus diterapkan di desa.

Kerjasama antara aparat desa dan tim ipteks bagi masyarakat terlaksana yang diawali dengan respon yang begitu besar dan mendapat tanggapan positif dari pemerintahan kecamatan yang di hadiri langsung oleh Camat Kecamatan Tompaso Barat yang memberikan dorongan bagi aparat untuk mengikuti pelatihan komputer yang di mulai dari pengoperasian awal komputer yang telah disiapkan oleh tim IBM di rumah Hukumtua Desa Touure yang diikuti oleh aparat desa. Pada pengoperasian komputer di jelaskan sistem operasi dan hal ini dilakukan pada pertemuan pelatihan pertama. Pelatihan pertemuan kedua di lakukan dengan meminta peserta untuk mengoperasionalkan komputer dan ternyata sudah terlihat ada beberapa aparat telah mengalami kemajuan seperti Sekretaris desa, Hukumtua, bendahara dan kepala jaga. Akhir dari pertemuan kedua ini oleh tim IBM memberikan tugas. Perkembangan yang menggembirakan ketika pada pertemuan ketiga pihak aparat desa begitu antusias dan begitu banyak pertanyaan yang harus tim IBM jawab, hingga beberapa pertemuan selanjutnya.

Pelaksanaan inti dalam pengoperasian program excel diberikan tim IBM bagi aparat desa dilakukan secara perlahan dan bertahap yang dimulai dari menjelaskan apa dan bagaimana program ini, apa kelebihan dan kekurangan mengoperasikan program excel hingga praktek bagi

aparat desa.

Dari hasil pengamatan terlihat keingintahuan aparat dan merasa sangat bermanfaat dalam praktek pengisian data yang sengaja di buat oleh tim IbM untuk di terapkan dan terlihat begitu mudahnya menyusun dan menghitung sejumlah angka dalam simulasi excel baik untuk menghitung dengan menggunakan simbol-simbol angka.

Tim IbM mulai memperlihatkan beberapa contoh buku yang harus di isi oleh aparat desa seperti buku kas umum, buku kas pembantu kegiatan dan laporan pertanggungjawaban bendahara desa. Maksud dari simulasi mengisi buku-buku tersebut adalah agar aparat desa tidak merasa canggung untuk mengisi buku sesuai dengan ketentuan yang diterapkan pemerintah yang pada akhirnya akan memperlancar pelaporan anggaran dana desa serta anggaran desa.





### DAFTAR PUSTAKA

Anonimous, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta  
-----, *Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa*.

-----, *Peraturan Pemerintah nomor no 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  
UU no 6 Tahun 2014*.

Buchari, W. Abdi.(2001). *Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Sulawesi Utara  
Manado*, Progress press.

Esmara, H. (2006), *Perencanaan Pembangunan di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.

Jhingan, M. L. (1994), *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, PT. Raja Grafindo Persada.

Kamaludin, R. (2001), *Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah*, LPFE UI, Jakarta.

Lemhanas (2007), *Pembangunan Nasional*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.

Suparmoko, M. (2001), *Ekonomi Publik Untuk Keuangandan Pembangunan Daerah*, Andi,  
Yogyakarta.